**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 390/Pdt.G/2018/PN Mnd TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PT SINARMAS MULTIFINANCE**

**Hafidh Lukmam Syaifuddin**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

hafidhsyaifuddin16040704097@mhs.unesa.ac.id

**Indri Fogar Susilowati**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

indrifogar@unesa.ac.id

**Abstrak**

Keberadaan lembaga pembiayaan konsumen memberikan kemudahan dalam memberikan dana untuk keperluan kredit kepada masyarakat di samping lembaga perbankan. Untuk memberikan kepastian bahwa debitor akan memenuhi kewajibannya, kreditor meminta adanya jaminan (fidusia) dimana jika debitor wansprestasi maka kreditor dapat melakukan eksekusi atas objek jaminan. Namun dalam pelaksanaan eksekusi sering menimbulkan permasalahan yaitu tindakan menarik dan/atau menahan secara paksa objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan berakibat adanya gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan (Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan pada penelitian ini digunakan pendekatan kasus (terkait gugatan perbuatan melawan hukum), pendekatan perundang-undangan (mengkaji peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikemukakan) serta pendekatan konseptual (mengutip pendapat sarjana sebagai dasar untuk menjawab permasalahan yang diteliti). Tujuan penelitian ini untuk memahami dan mengetahui pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd beserta akibat hukum yang diterima penggugat. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa hakim kurang tepat memasukkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan karena mengatur tentang perjanjian kredit pengadaan barang, sedangkan faktanya adalah perjanjian kredit dan pengakuan hutang. Sedangkan pertimbangan hakim yang menyatakan menarik dan/atau menahan kendaraan objek jaminan fidusia secara paksa merupakan perbuatan melawan hukum hanya berdasarkan pada objek jaminan fidusia tersebut bukan milik Tergugat (bukti T-2), hakim tidak menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Akibat hukum atas Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd adalah Penggugat (Dennie Mamangkey) memperoleh kembali haknya atas 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Agya warna merah, dan ganti rugi materiil sebesar Rp.179.000.000,-.

**Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Jaminan Fidusia.**

**Abstract**

The existence of consumer finance institutions provides convenience in providing funds for credit purposes to the public in addition to banking institutions. To provide certainty that the debtor will fulfill his obligations, the creditor asks for a guarantee (fiduciary) where if the debtor defaults, the creditor can execute the object of the guarantee. However, the execution often causes problems, namely the act of withdrawing and/or forcibly detaining the object of a fiduciary guarantee by a finance company resulting in a lawsuit against the law to the court (Decision Number 390/Pdt.G/2018/PN Mnd). The research method used is normative juridical research. The approach in this research used a case approach (related to lawsuits against the law), a statutory approach (reviewing regulations relating to the legal issues raised) and a conceptual approach (citing scholars' opinions as the basis for answering the problems studied). The purpose of this study is to understand and find out the judge's considerations on Decision Number 390/Pdt.G/2018/PN Mnd and the legal consequences received by the plaintiff. The results of this research and discussion indicate that the judge did not correctly enter the Regulation of the Minister of Finance Number: 130/PMK.010/2012 concerning Fiduciary Registration for Financing Companies because it regulates credit agreements for procurement of goods, while the facts are credit agreements and debt acknowledgments. While the judge's consideration that forcibly withdrawing and/or detaining the object of the fiduciary security object is an act against the law only based on the object of the fiduciary guarantee not belonging to the Defendant (exhibit T-2), the judge did not explain the elements of the unlawful act committed by the defendant. The legal consequence of Decision Number 390/Pdt.G/2018/PN Mnd is that the Plaintiff (Dennie Mamangkey) regained his rights to 1 (one) unit of a red Toyota Agya brand car, and material compensation of Rp. 179,000,000.-.

**Keywords: Unlawful Acts, Fiduciary guarantee**

**PENDAHULUAN**

Manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari pada kenyataanya tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, manusia memerlukan bantuan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mulai dari lahir, seseorang memerlukan bantuan bidan atau tenaga medis untuk kelancaran persalinannya, demikian pula ketika meninggal dunia memerlukan bantuan orang lain untuk pemakamannya. "Sudah menjadi sifat pembawaannya bahwa manusia hanya dapat hidup dalam masyarakat. Manusia adalah zoon politicon atau makhluk sosial"(Mertokusumo 2003).

Kebutuhan manusia itu beraneka ragam, dan dalam rangka memenuhi kebutuhannya tersebut, seseorang sering dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak, misalnya membutuhkan sejumlah uang. Untuk itu, ia akan berusaha mencari jalan keluar agar kebutuhannya terpenuhi. Seseorang bisa saja datang ke lembaga perbankan untuk meminjam uang, namun permasalahannya adalah lembaga bank dalam memberikan pinjaman dana, terutama pada pinjam dalam jumlah yang besar akan sangat hati-hati, dan tidak lepas dari pertimbangan prinsip Character, Capacity, Capital, Condition of economy, dan Collaterals atau dikenal dengan prinsip 5C (Fuady 1996). Mengingat prinsip-prinsip yang diterapkan oleh pihak perbankan tersebut, orang lalu berusaha mencari alternatif (pilihan) dalam memperoleh pinjaman dana (kredit) yang menurutnya tidak seketat seperti persyaratan yang diterapkan lembaga perbankan. Salah satu pilihan orang untuk memperoleh pinjaman dana (kredit) itu adalah lembaga pembiayaan. Sehingga saat ini banyak masyarakat mengajukan pinjaman di lembaga pembiayaan agar segera memiliki dana untuk memenuhi kebutuhannya(Fuady 1996).

Pembiayaan konsumen mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia, hal ini dikarenakan kemudahan yang diberikannya dalam penyaluran kredit dibandingkan bank. Terdapat beberapa faktor yang membuat pembiayaan konsumen mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia, menurut Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati faktor tersebut diantaranya(Prasetyawati 2012) :

a. Keterbatasan sumber daya formal;

b. Koperasi smpan pinjam sulit berkembang;

c. Bank tidak melayani pembiayaan konsumen;

d. Pembiayaan lintah darat yang mencekik.

Pertumbuhan perusahaan pembiayaan di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari jumlah pertumbuhan piutang dan kontrak pembiayaan yang mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai 2018

**Gambar 1.1**

Grafik Pertumbuhan Piutang Perusahaan Pembiayaan



Sumber : Data Statistik Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019

**Gambar 1.2**

Grafik Pertumbuhan kontrak Perusahaan Pembiayaan

 

Sumber : Data Statistik Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019

Regulasi yang memberi landasan hukum pembiayaan, diawali dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (selanjutnya disebut Keppres) Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Keppres Nomor 61 Tahun 1988 kemudian diubah dengan Peraturan Presiden (selanjutnya disebut Perpres) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Perpres tersebut, diatur mengenai kegiatan usaha yang dijalankan lembaga pembiayaan. Kegiatan usaha menurut ketentuan Pasal 2 Perpres Nomor 9 Tahun 2009, meliputi: a. Sewa Guna Usaha; b. Anjak Piutang; c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau d. Pembiayaan Konsumen. Pembiayaan Konsumen menurut Pasal 1 angka 7 Perpres Nomor 9 Tahun 2009, disebutkan bahwa Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Selain ketentuan diatas, lembaga pembiayaan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang kemudian diubah dengan POJK Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelengaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dalam Pasal 1 angka 1 POJK Nomor: 35 /POJK.05/2018, disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Adapun jenis kegiatan usaha perusahaan pembiayaan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor: 35 /POJK.05/2018, meliputi: a. Pembiayaan Investasi; b. Pembiayaan Modal Kerja; c. Pembiayaan Multiguna; dan/atau d. kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

Pengertian Pembiayaan Multiguna menurut Pasal 1 angka 4 POJK Nomor: 35 /POJK.05/2018, adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitor untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Pembiayaan multiguna menurut Pasal 4 ayat 3 POJK Nomor; 35 /POJK.05/2018 meliputi: a. Sewa Pembiayaan; b. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran; c. Fasilitas Dana d. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Jika dilihat dalam POJK terbaru, terdapat penambahan kegiatan pembiayaan multiguna yaitu fasilitas dana. Dengan adanya penambahan tersebut, terdapat perbedaan dalam hal pengertian dan kegiatan usaha pembiayaan konsumen antara Perpres Nomor 9 tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dengan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelengaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dimana perusahaan pembiayaan menurut POJK tersebut dapat memberikan pinjaman dana kepada debitur.

Kebutuhan manusia yang beranekaragam menimbulkan terjadinya akibat hukum antara pihak yang berkaitan untuk melakukan suatu kesepakatan. Perjanjian kredit antara seseorang (debitor) dengan kreditor (perusahaan pembiayaan konsumen) melalui fasilitas kredit multi guna biasanya diikat dalam suatu perjanjian kredit dan pengakuan utang dengan jaminan secara kepercayaan (fidusia) dimana perjanjian tersebut dibuat secara tertulis yang formatnya telah disediakan oleh pihak perusahaan pembiayaan, dan sudah dibakukan, yang dalam teori disebut dengan perjanjian standar (baku). Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut standard contract, standard agreement(Muhammad 1992).

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme. "Pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan"(Subekti 1994). Jadi, asasnya bahwa suatu perjanjian telah tercipta jika para pihak telah melakukan kesepakatan. Kesepakatan disini merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian tersebut dapat disepakati baik secara secara lisan maupun tertulis.

Perjanjian pembiayaan antara pihak kreditor dan debitor kadangkala pada umumnya terjadi keadaan debitor tidak lancar dalam mengangsur cicilan yang sudah menjadi kewajibannya berdasarkan perjanjian. Menurut Munir Fuady, bisnis pembiayaan konsumen tidak luput dari resiko sama sekali, sebagai lembaga fasilitas kredit, resiko tetap ada. Macetnya pembayaran kredit yang dilakukan oleh konsumen merupakan hal yang wajar(Warka and Sudarti 2014). Ketika debitor sudah beberapa kali tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur cicilan, sering dijumpai peristiwa pihak kreditor (perusahaan pembiayaan) lantas mengambil secara paksa objek perjanjian yang sudah dijaminkan melalui jaminan fidusia.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu penetapan dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd, tanggal 16 Mei 2019, terkait perbuatan melawan hukum yang mana dalam hal ini PT Sinarmas Multifinance telah melakukan perbuatan menarik dan/atau menahan secara paksa kendaraan merk Agya milik Dennie Mamangkey. Para pihak yang terlibat dalam perkara ini yaitu Dennie Mamangkey (Penggungat), PT. Sinar Mas Multifinance selaku kuasa dari PT. Bank Sinarmas Tbk Multifinance (Tergugat) dan Hendro Rony Royke Paat (Turut Tergugat).

Permasalahan pada kasus ini diawali pada bulan Januari 2017, dimana turut tergugat datang menemui penggugat untuk meminta bantuan sejumlah dana, akan tetapi pada saat itu penggugat sedang tidak memiliki sejumlah dana yang diperlukan oleh turut tergugat. Keesokan harinya, penggugat dengan niat baiknya merasa kasihan kepada turut tergugat, sehingga ia meminjamkan BPKB mobil Merk/Type Toyota Agya 1,0 G M/T 998 cc, Nomor Rangka : MHKA4DA3JF J065906, Nomor Mesin : 1KRA203925 Nomor Polisi : DB 1645 AZ, Warna Merah, Tahun 2015 kepadanya. Dengan bermodalan BPKB milik penggugat, turut tergugat pergi ke kantor tergugat untuk mengajukan fasilitas kredit yang pada akhirnya pengajuan kredit tersebut telah disetujui oleh tergugat. Kredit yang diberikan oleh tergugat kepada turut tergugat sejumlah Rp 77.796.000,- yang kemudian diangsur Rp 2.161.000,- per bulan selama 36 bulan. Dengan disetujuinya pinjaman tersebut, turut tergugat dan tergugat terikat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) nomor 117000023526 tanggal 8 Februari 2017. Pada proses pembuatan perjanjian tersebut, turut tergugat tidak diwajibkan untuk balik nama atas BPKB mobil Merk/Type Toyota Agya 1,0 G M/T 998 cc, Nomor Rangka : MHKA4DA3JF J065906, Nomor Mesin : 1KRA203925 Nomor Polisi : DB 1645 AZ, Warna Merah, Tahun 2015 yang menjadi objek jaminan fidusia, sehingga dapat diketahui bahwa secara sadar tergugat mengetahui kepemilikan dari BPKB tersebut adalah milik penggugat. Pada awalnya turut tergugat lancar dalam membayar angsuran, akan tetapi terjadi kemacetan pada bulan September sampai Desember yang pada akhir pada bulan Januari 2018 penggugat membantu turut tergugat ke kantor tergugat untuk membayar angsuran.

Tabel 1.1.

Keterlambatan Pembayaran Turut Tergugat



Sumber: Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd., halaman 29.

Penggugat pada akhirnya tidak dapat membantu Turut Tergugat untuk membayar angsuran 4 bulan sekaligus yang pada akhirnya staff dari tergugat mengempesi mobil ban dari mobil yang menjadi objek fidusia sehingga mereka tidak dapat membawa mobil tersebut kembali. Penggugat tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh staff tergugat akhirnya melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manado dengan dasar :

1. Tergugat tidak pernah memberikan somasi terlebih dahulu sebelum melakukan eksekusi;
2. Eksekusi yang dilakukan staff turut tergugat tidak disertai alasan yang jelas dan proses eksekusi yang tidak sesuai prosedur;
3. Objek jaminan fidusia tersebut masih merupakan milik penggugat;
4. Penggugat meminta pembatalan perjanjian fidusia kepada hakim.

Pada putusan nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd terdapat beberapa poin yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan tergugat menarik dan/atau menahan secara paksa kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan perbuatan melawan hukum. Poin yang menjadi dasar pertimbangan hakim diantaranya :

Pertama, dengan mempertimbangkan bukti surat tanda T-1 telah diketahui bahwa telah terjadi perbuatan hubungan hukum berupa Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) nomor 117000023526 tanggal 8 Februari 2017 antara tergugat (kreditor) dan turut tergugat (debitor). Turut tergugat selaku pemberi fidusia memberikan 1 buah mobil Merk/Type Toyota Agya 1,0 G M/T 998 cc, Nomor Rangka : MHKA4DA3JF J065906, Nomor Mesin : 1KRA203925 Nomor Polisi : DB 1645 AZ, Warna Merah, Tahun 2015 sebagai jaminan fidusia, hal ini dapat dilihat pada bukti surat tanda T-5 Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor : W25.00008982.AH.05.01, tanggal 10 Februari 2017. Pada poin pertimbangan ini, Majelis mempermasalahkan posisi pemberi fidusia yang mana turut diketahui bahwa pemilik dari objek jaminan tersebut merupakan milik penggugat. Dan perlu dipertanyakan lagi mengapa tergugat menjadikan hal tersebut menjadi objek jaminan fidusia untuk kredit sedangkan ia mengetahui fakta bahwa pemilik objek tersebut merupakan milik penggugat. Pada bukti surat tanda T-1 yang berbunyi, "Debitur dengan ini menyerahkan kepada Kreditur hak milik atas kendaraan Bermotor secara kepercayaan …. Dst" dan bukti surat tanda T-5 yang berbunyi," … Pemberi Fidusia diwajibkan untuk memberikan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia….." dapat diketahui bahwa tergugat telah mengkaburkan fakta seolah pemilik dari objek jaminan tersebut adalah milik turut tergugat.

Kedua, perbuatan tergugat dengan menarik dan/atau menahan secara paksa objek jaminan fidusia berupa 1 buah mobil Merk/Type Toyota Agya 1,0 G M/T 998 cc, Nomor Rangka : MHKA4DA3JF J065906, Nomor Mesin : 1KRA203925 Nomor Polisi : DB 1645 AZ, Warna Merah, Tahun 2015 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini seharusnya tergugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada turut tergugat karena hal ini berkaitan dengan perikatan secara perdata.

Ketiga, berkaitan dengan penarikan secara paksa dapat merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan, yang mana melalui peraturan tersebut ditegaskan bahwa "Melarang perusahaan pembiayaan menarik paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan dan apabila Debitor wanprestasi, maka perusahaan pembiayaan dapat menempuh upaya hukum ke pengadilan...", dan terhadap hal yang sama diatur pula dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, ditegaskan bahwa "Satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah adalah Kepolisian atas putusan Pengadilan", sehingga karenanya menurut hukum perbutan Tergugat dalam menarik dan mengambil objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan milik Penggugat tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan "Melarang perusahaan pembiayaan menarik paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan..." bila dicermati lebih lanjut terdapat penafsiran yang berbeda, dimana fakta yang ada dalam perbuatan dan hubungan antara tergugat dan turut tergugat merupakan Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 117000023526, tanggal 8 Februari 2017 dan sebagai Jaminan atas pemberian kredit tersebut, Turut Tergugat sebagai Pemberi Fidusia telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Agya 1,0 G M/T 998 cc, Nomor Rangka : MHKA4DA3JF J065906, Nomor Mesin : 1KRA203925 Nomor Polisi : DB 1645 AZ, Warna Merah, Tahun 2015 milik dari Penggugat atas nama Dennie Mamangkey, BPKB Nomor : RAF/04800/DA3J/2015 kepada Tergugat sebagai Penerima Fidusia.

Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 117000023526, tanggal 8 Februari 2017 antara tergugat dan turut tergugat jika merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan jo Pasal 1 angka 2 Perpres No 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga pembiayaan, perjanjian tersebut tidak termasuk pada kegiatan usaha perusahaan pembiayaan. Karena jika merujuk pada peraturan tersebut perusahaan pembiayaan tidak menyediakan kegiataan yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit untuk keperluan konsumen. Merujuk pada Pasal 1 angka 7 Perpres No 9 tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, kegiataan perusahaan pembiayaan berupa pembiayaan konsumen hanya sebatas pengadaan barang untuk keperluan konsumen dengan pembayaraan secara angsuran. Sehingga penggunaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan lebih tepat jika perjanjian antara tergugat dan turut tergugat berupa perjanjian pembiayaan dengan pengadaan barang sesuai kebutuhan turut tergugat dengan pembayaran secara angsuran sedangkan fakta perjanjian tersebut berupa perjanjian kredit dengan pengakuan hutang yang mana objek perjanjian tersebut adalah pinjam uang (utang-piutang).

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Manado dalam putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd., menyatakan tindakan Tergugat menahan/menarik secara paksa kendaraan Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum dan apa akibat hukum putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd bagi penggugat.

**METODE**

Roni Hanitijo Soemitro, membedakan penelitian hukum ke dalam dua macam, yaitu normatif dan sosiologis(Hanitijo Soemitro 1990). Penelitian hukum normatif berkaitan dengan data sebagai bahan hukum yang dikaji dari studi kepustakaan atau dokumen. Sedangkan penelitian hukum sosiologis lebih menekankan pada penelitian lapangan, guna memperoleh data langsung dari narasumbernya. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, menyebut penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”(Mahmud Marzuki 2003). Pendekatan penelitian merupakan suatu cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan dengan harapan dapat memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Dalam penelitian hukum normatif, terdapat beberapa jenis diantaranya yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)(Diantha 2017). Sehubungan dengan penggunaan penelitian hukum normatif, maka pendekatan terhadap masalah (isu hukum) dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*),dan pendekatan kasus (*case approach*).

Sumber bahan hukum yang dipergunakan sebagai bahan bahasan dan kajian dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer merupakan semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara yang terdiri atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif dan putusan agen-agen administrasi(Diantha 2017). Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2015 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, dan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd.

Untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang diperlukan, maka pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan *(library research*), yaitu dengan cara mempelajari buku-buku literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Pengolahan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan setelah bahan-bahan hukum yang didapat melalui penelitian kepustakaan terumpul. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode preskriptif, yang mana dalam penelitian bertujuan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau tidaknya atau apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum terkait isu hukum yang ada pada Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Manado dalam putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd., menyatakan tindakan Tergugat menahan/menarik secara paksa kendaraan Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum**

Hakim Pengadilan Negeri Manado dalam Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd memutuskan bahwa tindakan tergugat dalam menarik kendaraan objek jaminan fidusia secara paksa merupakan perbuatan melawan hukum, dimana pertimbangan hukum hakim diantaranya :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat angka 3, yaitu “Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan yang menarik/ menahan secara paksa kendaraan Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad); (alinea kelima halaman 45 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd.)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti dipertimbangkan petitum angka 2, maka terkait dengan petitum angka 3 ini, Majelis Hakim akan membuktikan hal apakah yang telah terjadi berkaitan dengan petitum angka 3 ini dimana Tergugat telah menarik kendaraan milik Penggugat 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Agya 1.0 G M/T 998 cc, Nomor Rangka MHKA4DA3JFJ065906, Nomor Mesin: 1KRA203925, Nomor Polisi: DB 1645 AZ, Warna Merah, Tahun 2015 secara paksa dan telah menahannya, sehingga kemudian perbuatan Tergugat tersebut oleh Penggugat dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum; (alinea keenam halaman 45-46 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd.)

 Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Tergugat yang telah menarik dan menahan kendaraan milik Penggugat......dst, sebagai perbuatan melawan hukum, maka haruslah dilihat hal yang melatarbelakangi adanya perbuatan penarikan kendaraan tersebut yang dilakukan oleh Tergugat; (alinea kesatu halaman 46 Putusan No. 390/Pdt.G/2018/PN Mnd.)

 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi, ternyata antara Tergugat dengan Turut Tergugat terdapat perbuatan dan hubungan hukum menyangkut pemberian kredit dengan jaminan fidusia (Kepercayaan), dimana Tergugat berkedudukan sebagai Kreditor dan Turut Tergugat berkedudukan sebagai Debitor, dan hal ini terlihat pada bukti surat tertanda T-1.., dan bukti surat tertanda T-5,... dst.; (alinea kedua halaman 46 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd.)

 Menimbang, bahwa ternyata dari bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim yang menjadi Debitor dalam pemberian kredit tersebut adalah Turut Tergugat, yaitu Hendro Rony Royke Paat dan Penggugat Dennie Mamangkey adalah selaku pemilik kendaraan...dst, sehingga sesungguhnya terdapat perbedaan kapasitas antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan posisi dan status jaminan fidusia...dst, sehingga Turut Tergugat bukan sebagai Pemilik...dst, lantas mengapa Tergugat dapat menjadikannya sebagai objek jaminan untuk kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat tersebut; (alinea ketiga halaman 46-47 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd.)

 Menimbang, bahwa uraian isi dokumen/surat dimaksud sebagaimana tersebut di atas, secara yuridis memberikan penekanan bahwasanya Tergugat secara nyata telah mengaburkan fakta menyangkut kepemilikan atas objek jaminan Fidusia...dst, dimana oleh Tergugat dikatakan bahwasanya kendaraan dimaksud adalah milik Turut Tergugat, padahal dari bukti kepemilikan secara nyata pula oleh Tergugat telah diketahui pemilik dari kendaraan tersebut adalah Penggugat...dst; (alinea kedua halaman 47 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd.)

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang senyatanya merupakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, yaitu perbuatan Tergugat yang telah menarik kendaraan berupa1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Agya...dst, dimana menurut hukum seharusnya Tergugat tidak menarik dan/atau mengambil kendaraan 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Agya....dst, melainkan harus dilakukan oleh Tergugat ialah mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Turut Tergugat....dst; (alinea kesatu halaman 48 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd.)

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dapat pula merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan, yang mana melalui peraturan tersebut ditegaskan bahwa “Melarang perusahaan pembiayaan menarik paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan dan apabila debitor wanprestasi, maka perusahaan pembiayaan dapat menempuh upaya hukum ke pengadilan...”, ...dst, sehingga karenanya menurut hukum perbuatan Tergugat dalam menarik dan mengambil objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan milik Penggugat tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum; (alinea kedua halaman 48 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd.)

Beberapa kutipan dari “Pertimbangan Hakum” di atas merupakan dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado mengambil putusan, yaitu mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 3. Berdasarkan hal tersebut, maka analisis yang dapat dikemukakan terkait petitum tersebut adalah :

1. **Mengkaburkan fakta kepemilikan objek jaminan fidusia**

Pengaburan fakta kepemilikan objek jaminan fidusia, yaitu berupa kendaaran 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Agya 1.0 G M/T 998 cc, Nomor Rangka MHKA4DA3JFJ065906, Nomor Mesin: 1KRA203925, Nomor Polisi: DB 1645 AZ, Warna Merah, Tahun 2015 adalah terbaca dari jawaban tergugat (dalam halaman 15-16 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd.) yang antara lain menyebutkan sebagai berikut:

Debitur/Turut Tergugat mengajukan permohonan kredit dengan menjaminkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang mana secara undang-undang merupakan benda bergerak yang wajib untuk dijaminkan dengan mekanisme pembebanan jaminan fidusia.

Bahwa pada saat Debitur/Turut Tergugat menjaminkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L 09797069 atas nama Dennie Mamangkey atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor (untuk selanjutnya disebut sebagai “Jaminan Kendaraan Bermotor”.

Turut Tergugat merupakan Debitur yang beritikad baik yang mengajukan permohonan kredit dengan menjaminkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang berada di bawah penguasaannya, sehingga berdasarkan Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata oleh karena Turut Tergugat adalah pihak yang menguasai jaminan kendaraan bermotor sehingga dapat dikatakan sebagai pemliknya....

Selain itu Tertugat sudah melakukan pengecekan keabsahan BPKB (vide Bukti T-2) atas unit jaminan fidusia dalam perkara a quo dan hasil pengecekan keabsahan BPKB tersebut tidak ditemukan masalah. Dengan demikian yang Tergugat tahu bahwa BPKB yang dijaminkan adalah milik Turut Tergugat.

Di samping itu, terkait kepemilikan objek jaminan fidusia 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Agya 1.0 G M/T 998 cc, Nomor Rangka MHKA4DA3JFJ065906, Nomor Mesin: 1KRA203925, Nomor Polisi: DB 1645 AZ, Warna Merah, Tahun 2015), adalah milik Penggugat (Dennie Mamangkey) didasarkan dari keterangan Josep Moningka dan Rudy H. Rumokoy, saksi-saksi di bawah sumpah/janji menerangkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat (Dennie Mamangkey) mempunyai mobil merk Toyota Agya warna merah (Halaman 34 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd.)

Dalam hukum jaminan dimungkinkan bahwa objek jaminan tersebut tidak harus milik debitor, jadi bisa atas nama dari penjamin, dimana hal tersebut harus ada persetujuan dengan penjamin. Dapat diketahui bahwa dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, pihak Perusahaan pembiayaan sebagai Penerima Fidusia (dalam hal ini Tergugat) biasanya tidak mungkin untuk menyelidiki terlebih dahulu apakah debitor (Pemberi Fidusia) benar-benar sebagai pemilik dari objek jaminan fidusia artinya orang yang dapat bertindak bebas atas barang-barang yang dijaminkan, terutama karena barang-barang yang dijaminkan itu berupa barang bergerak. Untuk itu perusahaan pembiayaan (Tergugat) harus mengadakan pemeriksaan fisik atas barang (benda) yang akan dijadikan jaminan guna meneliti mengenai kebenaran identifikasi barang, merk/tahun pembuatan/kapasitas/ukuran dan lain sebagainya, termasuk kebenaran kepemilikan dari barang tersebut berdasarkan bukti-bukti kepemilikan.

Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijaminkan tersebut harus milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut(Nurmala and Yuswalina 2019). Sebagaimana diketahui Pasal 1 angka 5 UU Jaminan Fidusia, menyebutkan bahwa pemberi fidusia haruslah pemilik benda objek jaminan fidusia. Oleh karena Pemberi Fidusia dianggap tetap menguasai secara fisik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, maka Pemberi Fidusia bertanggungjawab atas semua akibat dan harus memikul risiko yang timbul berkenaan dengan pemakaian dan keadaan benda yang dijaminkan tersebut.

Apabila mencermati Putusan Nomor: 390/Pdt.G/2018/PN Mnd., bahwa dalam Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor: 1117000023526, tertanggal 8 Februari 2017 (bukti T-1 dan TT-1) serta alat bukti tertulis (surat) dari Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat tidak tampak ada alat bukti yang dapat memberi petunjuk bahwa Dennie Mamangkey (Penggugat) adalah sebagai pihak penjamin yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum antara lain: menjaminkan kendaraan atau menyerahkan kendaraan kepada pihak Tergugat. Jika terdapat bukti bahwa Dennie Mamangkey (Penggugat) adalah sebagai pihak penjamin dalam perjanjian pembiayaan antara Tergugat dengan Turut Tergugat, maka pihak Tergugat (PT. Sinar Mas Multifinace), harus memberi somasi pula (pemberitahuan secara tertulis) kepada pihak penjamin sehubungan dengan adanya keterlambatan pembayaran angsuran oleh Turut Tergugat, sehingga pihak penjamin berkewajiban untuk membayar tunggakan angsuran dari Turut Tergugat.

Berdasarkan jawaban Tergugat dan keterangan saksi Josep Moningka dan Rudy H. Rumokoy tersebut dapat dibaca bahwa Tergugat sebenarnya mengetahui bahwa objek jaminan fidusia (“Jaminan Kendaraan Bermotor”) adalah bukan milik Turut Tergugat, sebab 1 (satu) unit mobil Merk/Type: Toyota Agya 1.0 G M/T 998 cc, Nomor Rangka: MHKA4DA3JFJ065906, Nomor Mesin: 1KRA203925, Nomor Polisi: DB 1645 AZ, Warna: Merah, Tahun 2015, BPKB (vide Bukti T-2) atas nama: Dennie Mamangkey (Penggugat). Dikaitkan dengan Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) No. 1117000023526, tanggal 08 February 2017 antara PT. Sinar Mas Multifinace (Tergugat) dengan Hendro Rony Royke Paat (Turut Tergugat), maka Tergugat bertindak sebagi penerima fidusia dan Turut Tergugat bertindak sebagai Pemberi Fidusia. Pasal 1 angka 5 UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Jadi, jelas UU Jaminan Fidusia mensyaratkan bahwa pemberi fidusia (Hendro Rony Royke Paat) haruslah pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yaitu 1 (satu) unit mobil Merk/Type: Toyota Agya, sebagaimana disebutkan di atas, yang ternyata adalah milik Penggugat. Di samping itu, perlu dikemukakan bahwa seharusnya pembebanan objek (benda) jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Dalam putusan perkara a quo, tidak terlihat adanya bukti formal bahwa perjanjian yang dibuat PT. Sinar Mas Multifinace (Tergugat) dengan Hendro Rony Royke Paat (Turut Tergugat) yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dibuat dalam Akta Notariil (Akta Notaris).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ditemukan fakta dalam pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa isi dokumen/surat dimaksud (vide Bukti T-2), secara yuridis memberikan penekanan bahwasanya Tergugat secara nyata telah mengaburkan fakta menyangkut kepemilikan atas objek jaminan fidusia, dimana oleh Tergugat dikatakan bahwasanya kendaraan dimaksud adalah milik Turut Tergugat, padahal dari bukti kepemilikan secara nyata pula oleh Tergugat telah diketahui pemilik dari kendaraan tersebut adalah Penggugat (Dennie Mamangkey). Pembuatan perjanjian yang tidak sesuai dengan Pasal 1320 membuat perjanjian tersebut terhapuskan dalam hal ini batal demi hukum dikarenakan tidak memuhi syarat objektif yaitu “suatu sebab yang halal” . Yang artinya tanpa adanya permintaan pembatalan kepada hakim, perjanjian ini sudah batal terlebih dahulu(Wahidah 2020).

1. **Perbuatan Tergugat dalam Menarik/Menahan Ojek Jaminan Fidusia**

Berkaitan dengan perbuatan Tergugat dengan menahan secara paksa objek jaminan fidusia berupa 1 buah mobil Merk/Type Toyota Agya 1,0 G M/T 998 cc, Nomor Rangka : MHKA4DA3JF J065906, Nomor Mesin : 1KRA203925 Nomor Polisi : DB 1645 AZ, Warna Merah, Tahun 2015, diawali dengan adanya wanprestasi yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat.

1. **Adanya Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 117000023526 tanggal 8 Februari 2017 (bukti T-1)**

Adanya perjanjian kredit tersebut, dibenarkan oleh turut tergugat melalui jawaban turut tergugat yang menyatakan bahwa apa yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah benar dimana Turut Tergugat sebagai konsumen dari Tergugat pernah mendapatkan fasilitas kredit multiguna dengan jaminan kendaraan milik Penggugat (jawaban Turut Tergugat point angka 1, vide halaman 32 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd). Dengan adanya perjanjian tersebut, maka pada diri debitor melekat suatu kewajiban hukum yaitu memenuhi apa yang sudah diperjanjikan, dan apabila debitor tidak mampu menjalankan kewajiban, di luar keadaan yang normal, berarti debitor wanprestasi.

 Salim H.S dalam bukunya berjudul “HUKUM KONTRAK Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak”, seorang debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi jika dia telah diberikan somasi sebanyak 3 kali oleh kreditur atau jurusita. Apabila somasi tersebut diabaikan olehnya, maka kreditur berhak membawa persoalan tersebut ke pengadilan dan pengadilan tersebut yang memutuskan apakah si debitor wanprestasi atau tidak(salim 2017). Perlu diketahui, baik Penggugat dan Turut Tergugat menyatakan bahwa sebelum dilakukan penarikan, mereka tidak pernah diberikan somasi terlebih dahulu oleh Tergugat. Hal ini dapat dilihat dari jawaban Turut Tergugat yang menyatakan bahwa “saya (turut tergugat) tidak pernah menerima surat teguran dari Tergugat” (jawaban turut tergugat point angka 5, vide halaman 32 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd). Secara teoretis, apabila kreditor telah memberikan somasi kepada debitor, dan debitor tidak menanggapi somasi kreditor, maka jalan bagi kreditor untuk menuntut debitor dengan mengajukan gugatan wanprestasi melalui pengadilan.

1. **Menarik/menahan secara paksa kendaraan yang menjadi objek sengketa (objek jaminan fidusia) adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*)**

Terkait dengan perbuatan staff Tergugat yang melakukan tindakan mengempesi keempat roda/ban mobil objek sengketa dan menghalangi jalan keluar objek sengketa sehingga Penggugat tidak dapat lagi membawa pulang kendaraan yang menjadi objek sengketa dimana dalam persidangan Tergugat tidak memberikan bantahan mengenai hal tersebut yang mengakibatkan hakim akan menilai apa yang dikemukakan Penggugat adalah benar adanya. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan bukti surat, yaitu bukti P-5, bukti T-2, serta keterangan Josep Moningka dan Rudy H. Rumokoy, saksi-saksi di bawah sumpah/janji menerangkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat (Dennie Mamangkey) mempunyai mobil merk Toyota Agya warna merah, ditahan oleh Sinar Mas (Halaman 34 dan 35 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd.), maka atas hal tersebut dapat dikatakan bahwa Tergugat mengakui perbuatannya.

 Berkaitan dengan eksekusi atas objek jaminan fidusia, perusahaan pembiayaan dalam melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia harus memenuhi ketentuan Pasal 29 sampai 34 UU Jaminan Fidusia yang mana eksekusi tersebut diantaranya:

1. Eksekusi langsung dengan title eksekutorial

Perusahan pembiayaan, yang dalam hal ini PT Sinarmas Multifinance dapat langsung melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia tanpa melalui putusan pengadilan dengan mengajukan penetapan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi(Suadi 2017).

1. Pelelangan umum

PT Sinarmas Multifinance dapat juga melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum yang mana hasil dari pelelangan tersebut diharapkan dapat melunasi piutang kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf b.

1. Penjualan dibawah tangan

PT Sinarmas Multifinance dapat melakukan penjualan dibawah tangan atas objek jaminan fidusia dengan adanya kesepakatan antara dirinya dengan debitor untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Penjualan dapat dilakukan setelah adanyan pengumuman melalui surat kabar (minimal 2 surat kabar) selama 1 bulan.

Selain eksekusi menurut UU Jaminan Fidusia, menurut Munir Fuady PT Sinarmas Multifinance dapat melakukan gugatan biasa ke Pengadilan Negeri Manado(Saliman 2005).

Eksekusi menurut POJK No 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelengaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan diatur dalam Pasal 49 sampai Pasal 52. Perusahaan pembiayaan dalam hal ini PT Sinarmas Multifinance wajib memiliki pedoman internal untuk melakukan eksekusi dan mempraktekannya sesuai dengan pedoman internal tersebut. Sebelum melakukan eksekusi, perusahaan pembiayaan wajib memenuhi beberapa ketentuan diantaranya: debitor terbukti wanprestasi, debitor sudah diberikan surat peringatan, memiliki sertifikat jaminan fidusia.

Sementara itu, jika merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia sebagimana dimaksud pada pertimbangan hakim pada Putusan No 390/Pdt.G/2018/PN Mnd, perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan secara paksa.

 Pada poin ini dapat diketahui bahwa tidak ada peraturan undang-undang di Indonesia yang menyatakan bahwa eksekusi atas objek jaminan fidusia dapat dilakukan secara paksa. Jadi tindakan tergugat dalam melakukan penarikan secara paksa objek jaminan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Pada Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd hakim menyatakan perbuatan Tergugat dalam menarik dan/atau menahan objek jaminan fidusia secara paksa merupakan perbuatan melawan hukum yang mana perbuatan yang seharusnya dilakukan Tergugat adalah melakukan gugatan wanprestasi ke pengadilan (alinea kesatu halaman 48 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd.). Dalam hal untuk mendukung pertimbangan hukumnya tersebut, hakim seharusnya menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak (Pasal 178 ayat 1 HIR, Pasal 189 ayat 1 RBb). Pengertian perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. “

Dari Pasal 1365 KUHPerdata apabila hendak dikaitkan dengan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Untuk lebih jelasnya unsur-unsur perbuatan melawan hukum Tergugat dalam perkara ini diantaranya(Hassanah 2016):

1. Adanya perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum sejak tahun 1919 tidak diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi:

* Perbuatan bertentangan dengan hak orang lain;
* Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
* Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
* Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau kaharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik(Yuniarlin 2012).

Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa perbuatan Tergugat (PT. Bank Sinarmas Tbk Multifinance) telah memenuhi unsur melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain sebab Tergugat telah mengetahui bahwa objek jaminan fidusia bukanlah milik Turut Tergugat berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T-2., dan Tergugat telah menarik kendaraan milik Penggugat 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Agya 1.0 G M/T 998 cc, Nomor Rangka MHKA4DA3JFJ065906, Nomor Mesin: 1KRA203925, Nomor Polisi: DB 1645 AZ, Warna Merah, Tahun 2015 secara paksa dan telah menahannya.

1. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Unsur kesalahan harus dipenuhi agar tergolong sebagai perbuatan melawan hukum. Tindakan yang mengandung unsur kesalahan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika memenuhi:

* Adanya unsur kesengajaan;
* Adanya unsur kelalaian;
* Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf(Yuniarlin 2012).

Dalam perkara a quo, secara objektif seharusnya Tergugat sudah dapat menduga bahwa kendaraan yang dijadikan objek jaminan fidusia bukanlah milik Turut Tergugat, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Jaminan Fidusa, pemberi fidusia haruslah pemilik benda (kendaraan) objek jaminan fidusia. Demikian pula, secara subjektif seharusnya Tergugat bertindak hat-hati (teliti) dapat menduga akan akibat dari perbuatannya, yakni menerima objek jaminan fidusia yang bukan pemilik benda (kendaraan) objek jaminan, apalagi menarik dan/atau menahannya secara paksa.

1. Adanya kerugian bagi korban

Kerugian atas perbuatan melawan hukum menurut Rosa Agustina dalam bukunya berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” dikatakan bahwa dalam hal kerugian, penggugat dapat meminta gant rugi pada tergugat atas kerugian nyata yang dideritanya (Materiil) maupun keuntungan yang akan diperoleh dikemudian hari (Immateriil). Pada prakteknya, tuntuan ganti rugi Immateriil diserahkan kepada hakim dengan prinsip ex aquo et bono, yang mana dalam hal ini terdapat kesulitan untuk menentukan besaran kerugian Immateriil karena tolak ukurna berdasarkan subjektifitas hakim. Dengan adanya Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994, Mahkamah Agung memberikan pedoman terkait kerugian Immateriil yang isinya:“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”(Prasetio and Dwinanto 2011).

 Kerugian yang dialami penggugat ada 2 yaitu kerugian materiil (sebesar Rp 179.000.000,-) dan kerugian inmateriil (Rp 1.000.000.000,-).

1. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian

Kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku haruslah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan itu, bukan perbuatan yang lainnya atau terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan pelaku. Terdapat 2 teori berkaitan dengan hal ini yaitu teori hubungan faktual (causation in fact) dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanya berkaitan dengan masalah fakta atau secara faktual yang terjadi, penyebab yang dapat menimbulkan kerugian merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian tidak akan pernah ada tanpa penyebabnya. Sebab akibat ini sering disebut dengan hukum mengenai “but for” atau “sine qua non”(Yuniarlin 2012).

 Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat baik itu pengkaburan fakta kepemilikan dan penarikan secara paksa kendaraan telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat yakni kerugian secara materiil sebesar Rp. 179.000.000,- yang selayaknya dapat diharapkan.

1. **Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan**

Sehubungan dengan “Pertimbangan Hukum” majelis hakim yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012, yang mana melalui peraturan tersebut ditegaskan bahwa “Melarang perusahaan pembiayaan menarik paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan dan apabila debitor wanprestasi, maka perusahaan pembiayaan dapat menempuh upaya hukum ke pengadilan...”. Apabila mencermati pertimbangan hukum tersebut yaitu “Melarang perusahaan pembiayaan menarik paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan dan apabila debitor wanprestasi...”, maka perlu dikaji konsep awal pembiayaan konsumen, dimana pembiayaan konsumen merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran(Pasal 1 angka 7 Perpres No 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga pembiayaan). Dari pengertian tersebut, maka terdapat 3 (tiga) pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu pihak perusahaan pembiayaan (kreditor), konsumen (debitor), dan pihak penyedia barang (supplier).

Dalam pembiayaan konsumen, pihak konsumen (debitor) menginginkan barang yang diperlukan, kemudian pihak perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor) sebagai pihak yang membiayai pembelian barang atas permintaan konsumen dengan membayar secara tunai kepada pemasok (supplier). Pemasok disini sebagai pihak yang menyerahkan barang kepada konsumen, sedangkan konsumen (debitor) melakukan pembayaran secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan. Hubungan hukum antara Perusahaan Pembiayaan dengan Pemasok (Supplier) adalah jual beli barang (kendaraan) secara tunai. Kemudian hubungan hukum antara Pemasok dengan Konsumen adalah penyerahan barang (kendaraan), sedangkan hubungan hukum antara Konsumen dengan Perusahaan Pembiayaan adalah perjanjian kredit kendaraan bermotor yang pembayarannya secara angsuran sesuai perjanjian. Di sini pihak perusahaan pembiayaan (kreditor) meminta kepada konsumen adanya jaminan yang memberi kepastian hukum bagi pelunasan kewajiban dari pihak konsumen (debitor), dan sebagai jaminan tersebut biasanya BPKB atas nama konsumen (debitor) dipegang/ditahan pihak perusahaan pembiayaan (kreditor), kemudian baru diserahkan kepada konsumen apabila kewajiban pembayaran angsuran lunas. Skema dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara kreditor dengan debitor (konsumen) dapat dibaca dalam gambar 1.1.

**Gambar 1.1.**

Skema Perjanjian Pembiayaan Konsumen(Otoritas Jasa Keuangan 2019).



Keterangan:

1. Debitor (konsumen) mengajukan permohonan pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan.
2. Perusahaan Pembiayaan menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Debitor (konsumen).
3. Debitor (konsumen) memilih barang/jasa yang akan dibeli dengan membayar secara angsuran (kredit).
4. Perusahaan Pembiayaan melakukan transakasi secara tunai atas nama debitor untuk pembelian barang yang dibutuhkan debitor kepada Supplier (pemasok) sebagai penyedia barang/jasa.
5. Supplier memberikan (menyerahkan) barang/jasa yang dibeli kepada Debitor (konsumen).
6. Supplier menyerahkan bukti penerimaan barang kepada Perusahaan Pembiayaan atas barang yang telah diserahkan kepada Debitor (konsumen).
7. Debitor (konsumen) membayar secara angsuran kepada Perusahaan Pembiayaan sampai pelunasan.

 Dalam perkembangan perjanjian pembiayaan (kredit), perusahaan pembiayaan selaku kreditor menyediakan dana (uang) kepada konsumen (debitor) untuk keperluan konsumtif. Contoh dalam kaitannya dengan hal ini adalah pengajuan permohonan kredit oleh Hendro Rony Royke Paat (debitor) kepada PT. Bank Sinarmas Tbk Multifinance (kreditor) yang kemudian diikat berdasarkan Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kredit. Pada permohonan kredit tersebut, pihak debitor menjaminkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Dennie Mamangkey.

 Jika merujuk pada Perpres Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dapat diketahui bahwa kegiatan perusahaan pembiayaan belum mengenal mengenai fasilitas kredit. Kegiatan perusahaan menurut Perpres No 9 tahun 2009 hanya sebatas pembiayaan atas pengadaan barang berdasarkan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

 Berbicara mengenai fasilitas kredit, dalam POJK Nomor Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelengaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan memuat pengaturan mengenai fasilitas kredit. Pembiayaan multiguna menurut Pasal 4 ayat 3 POJK Nomor; 35 /POJK.05/2018 meliputi: a. Sewa Pembiayaan; b. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran; c. Fasilitas Dana d. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pada hal ini terdapat perbedaan istilah dan jenis kegiatan usaha pebiayaan konsumen, dimana dalam dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2009, digunakan istilah Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*), sedangkan dalam POJK Nomor 29/POJK.05/2014 yang selanjutnya diubah dengan POJK Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelengaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, digunakan istilah Pembiayaan Multiguna, keduanya melalui cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran, akan tetapi sejak ada POJK terbaru terdapat perbedaan mengenai kegiatan usaha pembiayaan dimana dalam POJK tersebut kegiatan pembiayaan tidak hanya pembelian dengan pembayaran secara angsuran tetapi juga terdapat fasilitas kredit.

 Terkait dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 pada putusan tersebut, maka perlu menelusuri Pasal-Pasal terkait yaitu Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 yang menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya kepada perusahan pembiayaan. Selanjutnya Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 berbunyi: “Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.”

Jadi, berdasarkan hal diatas dapat dikatakan bahwa penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor konsep awalnya bahwa debitor (konsumen) mengadakan perjanjian dengan perusahaan pembiayaan dimaksudkan untuk perjanjian kredit pengadaan kendaraan bermotor yang pembayarannya secara angsuran (secara kredit). Untuk itu, sebagai jaminan maka BPKB kendaraan bermotor atas nama debitor (sebagai pemberi fidusia) dipegang oleh perusahaan pembiayaan (selaku penerima fidusia) sedangkan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia ada di tangan konsumen (pemberi fidusia). Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menerapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dalam perkara a quo, kurang tepat dan lebih berbobot jika pembuktian bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

**Akibat Hukum Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd Bagi Penggugat**

Akibat hukum bagi penggugat atas Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 390/Pdt.G/PN Mnd diantaranya:

1. **Menyatakan Sah Kepemilikan Penggugat atas 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Agya 1.0 G M/T 998 cc, Nomor Rangka MHKA4DA3JFJ065906, Nomor Mesin: 1KRA203925, Nomor Polisi: DB 1645 AZ, Warna Merah, Tahun 2015**

Dikabulkannya petitum gugatan Penggugat angka 2 oleh mejelis hakim, karena hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat. Dalam hal ini Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-2, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-2. Namun, setelah memeriksa bukti surat tanggal 27 Januari 2017 tertanda P-2 (halaman 33 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd) tampak bahwa surat kuasa tersebut hanya *fotocopy* tanpa menunjukkan surat asli. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 mengakomodasi fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan syarat dikuatkan dengan alat bukti lain. Jika tidak dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka fotokopi surat tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Menurut M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Devina Puspita Sari , suatu fotokopi surat yang diajukan di dalam persidangan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah apabila dapat dicocokkan dengan aslinya atau dikuatkan dengan alat bukti lain(Sari 2019).

 Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Josep Moningka dan Rudy H. Rumokoy, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui bahwa Penggugat mempunyai mobil merk Toyota Agya warna merah. Keterangan saksi dapat dinilai sebagai keterangan yang bernilai pembuktian, terbatas pada keterangan tentang peristiwa yang langsung dialami oleh saksi, baik tentang apa yang diketahui atau dilihatnya atau didengarnya pada waktu peristiwa tersebut terjadi. Keterangan saksi harus diberikan secara lisan dan pribadi (disampaikan sendiri) dan tidak boleh diwakilkan dan tidak boleh secara tertulis, diberikan di muka hakim (dalam persidangan).

 Berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T.2, dan keterangan dua orang saksi tentang mobil merk Toyota Agya warna merah tersebut dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Agya 1.0 G M/T 998 cc, Nomor Rangka MHKA4DA3JFJ065906, Nomor Mesin: 1KRA203925, Nomor Polisi: DB 1645 AZ, Warna Merah, Tahun 2015 dengan BPKB Nomor RAF/04800/DA3J/2015 adalah milik dari Penggugat atas nama Dennie Mamangkey.

 Sehubungan dengan akibat hukum bagi Penggugat dalam putusan perkara a quo sudah nampak jelas, namun terdapat permasalahan yaitu pengembalian piutang kreditornya (dari Turut Tergugat kepada Tergugat), pihak mana yang harus mengembalikan? Untuk menjawab dan membahas masalah ini yang perlu diketahui adalah bahwa Putusan Nomor: 390/Pdt.G/2018/PN Mnd., telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sehingga membawa pula akibat hukum kepada pihak yang kalah, yaitu PT. Bank Sinarmas Tbk Multifinance (Tergugat), berupa kerugian-kerugian sehubungan dengan adanya Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 1117000023526 tanggal 08 Februari 2017 antara Tergugat dengan Turut Tergugat, dimana dalam perjanjian pembiayaan tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Plafon pinjaman (fasilitas kredit multiguna) yang disetujui Tergugat kepada Turut Tergugat sebesar Rp. 77.796.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) jangka waktu 36 bulan.
2. Turut Tergugat sudah menerima pencairan dana sebesar Rp. 50.000.000,- sesuai perintah Turut Tergugat dalam surat pernyataan transfer tertanggal 08 Februari 2017 (bukti T-3).
3. Angsuran per bulan sebesar Rp. 2.161.000,- (dua juta seratus enam satu ribu rupiah) dari total kewajiban Turut Tergugat sebesar Rp. 77.796.000,-. Turut Tergugat telah membayar angsuran sebanyak 8 (delapan) kali angsuran terhitung sejak angsuran pertama sampai dengan angsuran kedelapan. Total pembayaran angsuran sebesar Rp. 17.288.000,- (bukti T-4).
4. Penjualan di bawah tangan unit jaminan fidusia (satu unit mobil Merk/Type Toyota Agya 1.0 G M/T 998 cc, Nomor Rangka MHKA4DA3JFJ065906, Nomor Mesin: 1KRA203925, Nomor Polisi: DB 1645 AZ, Warna Merah, Tahun 2015 dengan BPKB Nomor RAF/04800/DA3J/2015, oleh Tergugat seharga Rp. 90.000.000,- (bukti T-9) guna melunasi kewajiban Debtor (Turut Tergugat).

 Apabila dikalkulasi, maka dana yang sudah diterima oleh Turut Tergugat dari Tergugat adalah Rp. 50.000.000,- (bukti T-3) dari plafon pinjaman sebesar Rp. 77.796.000,-. Kemudian Turut Tergugat telah membayar angsuran sebanyak 8 kali (Rp. 2.161.000,- x 8 = Rp. 17.288.000,-) sesuai bukti T-4. Jika debitor (Turut Tergugat) lancar dalam memenuhi kewajiban hingga jangka waktu 36 bulan, maka dana yang dikembalikan kepada Tergugat adalah Rp. 2.161.000,- x 36 = Rp. 77.796.000,-. Dengan demikian sisa yang harus dilunasi oleh Turut Tergugat kepada Tergugat adalah Rp. 77.796.000,- dikurangi Rp. 17.288.000,- = Rp. 60.508.000,-

 Sementara itu hasil penjualan di bawah tangan unit jaminan fidusia guna melunasi kewajiban Debitor (Turut Tergugat) adalah Rp. 90.000.000,-. Jadi sisa hasil penjualan di bawah tangan unit jaminan fidusia guna melunasi kewajiban Debitor adalah sebesar Rp. 90.000.000,- dikurangi Rp. 60.508.000,- = Rp. 29.492.000,-. Sisa sebesar Rp. 29.492.000,- harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat. Secara materiil Tergugat juga menderita kerugian dengan adanya amar putusan yang menyatakan: Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 179.000.000,- yang harus dibayar secara tunai setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Jadi, dengan telah dijualnya objek jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Agya 1.0 G M/T 998 cc, Nomor Rangka MHKA4DA3JFJ065906, Nomor Mesin: 1KRA203925, Nomor Polisi: DB 1645 AZ, Warna Merah, Tahun 2015 dengan BPKB Nomor RAF/04800/DA3J/2015 melalui penjualan dibawah tangan ((bukti T-9), maka piutang (tagihan) Tergugat kepada Turut Tergugat sudah terpenuhi.

1. **Berakhirnya Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 117000023526**

Berakhirnya suatu perjanjian diantara para pihak disebabkan(Hartana 2016) :

1. Ditentukan oleh para pihak dalam waktu tertentu;
2. Undang-undang menentukan batas waktu berakhirnya perjanjian;
3. Para pihak atau Undang-undang menentukan dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian tersebut berakhir.

 Berakhirnya perjanjian dalam KUH Perdata diatur dalam bab XII buku III yaitu pada Pasal 1381 yang mana disebutkan berkahirnya perjanjian dikarenakan :

1. Pembayaran

Pembayaran disini merupakan pemenuhan segala prestasi yang ada pada perjanjian antara debitor dan kreditor.

1. Penawaran pembayaran tunai yang diikuti penyimpanan atau penitipan

Berakhirnya perjanjian terjadi dimana kreditor menolak pembayaran hutang dari debitor, maka debitor dapat melakukan pembayaran dengan cara kogsinasi ke pengadilan setempat, dengan cara tersebut debitor dapat mengakhiri perjanjian tersebut.

1. Pembaharuan hutang

Pembaharuan hutang disini yaitu perjanjian yang sudah ada dihapuskan untuk membuat perjanjian baru.

1. Kompensasi

Kompensasi disini merupakan cara pengakhiran hutang dengan mengitung hutang masing-masing yang kemudian dapat ditagih secara timbal balik.

1. Pencampuran utang

Percampuran utang disini merupakan suatu pengakhiran hutang dimana orang yang berpiutang dan berutang berada pada satu orang.

1. Pembebasan utang

Pembebasan utang disini merupakan kesepakatan secara sukarela yang diakukan leh kreditor kepada kreditor untuk membebaskannya dari utang.

1. Musnahnya barang yang terutang

Hapusnya perjanjian terjadi ketika barang yang menjadi objek pada perjanjian musnah.

1. Pembatalan

Pembatalan perjanjian disini terjadi ketika tidak dipenuhinya syarat subjekti maupun syarat objektif pada perjanjian. Jika syarat subjetif maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan sedangkan jika syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum walaupun belum adanya putusan pengadilan.

1. Berlakunya syarat batal

Suatu keadaan dimana suatu perjanjian antara kreditor dan debitor dapat berkahir jika memenuhi suatu persyaratan tertentu.

1. Lampau waktu

Hapusnya perjanjian karena lewatnya waktu tertentu dan syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

 Berakhirnya Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 117000023526 antara tergugat dan Turut Tergugat terjadi dikarenakan dalam perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal dimana Tergugat secara sadar menerima objek yang menjadi jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Agya 1,0 G M/T 998 cc, Nomor Rangka : MHKA4DA3JF J065906, Nomor Mesin : 1KRA203925 Nomor Polisi : DB 1645 AZ, Warna Merah, Tahun 2015 milik dari Penggugat atas nama Dennie Mamangkey yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 5 UU Jaminan Fidusia. Sebagaimana pada pertimbangan hakim pada pettitum gugatan penggugat ke 2 menyatakan bahwa objek jaminan fidusia tersebut merupakan milik Penggugat yang mana hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pada Pasal 1365 KUH Perdata.

 Berdasarkan hal tersebut, maka Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 117000023526 antara tergugat dan Turut Tergugat batal demi hukum sebagaimana pada putusan hakim yang berbunyi:

“Menyatakan Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) No. 1117000023526, tanggal 08 February 2017 antara PT. Sinar Mas Multifinace berkedudukan di Jakarta, melalui Kantor Jl. Sam Ratulangi No.18 Manado dengan Hendro Rony Royke Paat, yang bertempat tinggal di Kota Tomohon adalah tidak sah dan batal demi hukum.”

1. **Mendapatkan ganti rugi**

Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat menimbulkan kerugian bagi tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata Tergugat berkewajiban melakukan ganti rugi atas perbuatannya. Kerugian atas perbuatan melawan hukum menurut Rosa Agustina dalam bukunya berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” dikatakan bahwa dalam hal kerugian, penggugat dapat meminta gant rugi pada tergugat atas kerugian nyata yang dideritanya (Materiil) maupun keuntungan yang akan diperoleh dikemudian hari (Immateriil)(Prasetio and Dwinanto 2011). Ganti rugi atas perbuatan melawan hukum :

1. Ganti rugi materiil

Pada gugatan yang diajukan oleh penggugat, penggugat meminta ganti rugi materiil sebesar Rp 179.000.000 (Rp 15.000.000,- sebagai kerugian operasional selama 90 hari sedangkan Rp 165.000.000 merupakan taksiran harga mobil sebelum perjanjian tersebut dibuat). Hakim mengabulkan gugatan penggugat tersebut dimana tuntutan ganti yang diajukan oleh penggugat masuk akal karena sesuai dengan kenyataannya.

1. Ganti rugi inmateriil

Penggugat dalam hal ini juga mengajukan tuntutan ganti rugi inmateriil, atas penarikan secara paksa yang dilakukan oleh staff tergugat membuat ketakutan bagi keluarga Penggugat dan merusak kredibilitas ditempat tinggal Penggugat. Atas hal tersebut, penggugat meminta ganti rugi immateril senilai Rp 1.000.000.000,-. Pada tuntutan ganti rugi inmateriil, awalnya diserahkan kepada hakim dengan prinsip ex aquo et bono, yang mana dalam hal ini terdapat kesulitan untuk menentukan besaran kerugian Immateriil karena tolak ukurna berdasarkan subjektifitas hakim. Dengan adanya Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994, Mahkamah Agung memberikan pedoman terkait kerugian Immateriil yang isinya:“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”(Prasetio and Dwinanto 2011).

Ganti rugi inmateriil yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000 tidak memenuhi sebagaimana Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 sehingga hakim menolak gugatan atas kurgian inmateriil yang diajukan oleh Penggugat.

Berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd, Dennie Mamangkey (Penggugat) sebagai pemenang dalam putusan tersebut berhak mendapatkan kembali haknya yaitu 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Agya 1.0 G M/T 998 cc, Nomor Rangka MHKA4DA3JFJ065906, Nomor Mesin: 1KRA203925, Nomor Polisi: DB 1645 AZ, Warna Merah, Tahun 2015 dengan BPKB Nomor RAF/04800/DA3J/2015 yang merupakan miliknya dan juga biaya ganti rugi materiil sebesar Rp 179.000.000,-. jika Tergugat (PT. Bank Sinarmas Tbk Multifinance) sebagai pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan, maka pihak yang dimenangkan dalam putusan, yaitu Dennie Mamangkey (Penggugat) dapat memohon pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pengadilan yang akan melaksanakannya secara paksa sehingga ia mendapatkan kembali haknya.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan pada rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pada dasar pertimbangan hakim yang menyatakan perbuatan tergugat dalam menarik dan/atau menahan secara paksa kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dikatakan bahwa :
2. Pertimbangan hukum hakim yang menyatakan menarik kendaraan objek jaminan fidusia secara paksa merupakan perbuatan melawan hukum dengan merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan adalah tidak meneliti secara keseluruhan ketentuan dalam aturan tersebut, yang apabila dicermati Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tersebut mengatur tentang objek jaminan secara fidusia dari adanya perjanjian kredit pengadaan barang. Sedangkan faktanya adalah perjanjian kredit dan pengakuan hutang (perjanjian utang-piutang uang).
3. Pertimbangan hakim yang menyatakan menarik dan/atau menahan kendaraan objek jaminan fidusia secara paksa merupakan perbuatan melawan hukum hanya didasarkan bukti formil bahwa yang dijadikan objek jaminan fidusia yaitu barang bukan milik Tergugat (bukti T-2). Hakim dalam hal ini tidak menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat.
4. Akibat hukum putusan tersebut penggugat yakni Dennie Mamangkey sebagai pemenang dalam putusan tersebut berhak mendapatkan kembali haknya yaitu 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Agya 1.0 G M/T 998 cc, Nomor Rangka MHKA4DA3JFJ065906, Nomor Mesin: 1KRA203925, Nomor Polisi: DB 1645 AZ, Warna Merah, Tahun 2015 dengan BPKB Nomor RAF/04800/DA3J/2015 yang merupakan miliknya dan juga biaya ganti rugi materiil sebesar Rp 179.000.000,-.

**Saran**

1. Hakim dalam memutus perkara harus lebih teliti lagi dan juga hakim harus melengkapi alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Hal ini dikarenakan, dalam putusan tersebut hakim kurang menjelaskan secara spesifik tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak itu seperti apa, dimana dalam hal ini hakim seharusnya menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum terkait perbuatan menarik dan/atau menahan secara paksa kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia.
2. Perusahaan Pembiayaan dalam hal ini agar memegang prinsip kehati-hatian dalam membuat perjanjian pembiayaan konsumen, terutama berkaitan dengan kepemilikan objek jaminan fidusia serta dalam melakukan eksekusi atas objek jaminan harus sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang Jaminan Fidusia, hal ini dikarenakan tergugat (PT. Bank Sinarmas Tbk Multifinance) seharusnya dalam membuat perjanjian terlebih dahulu meneliti apakah barang yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah benar-benar milik Hendro Rony Royke Paat (turut tergugat) atau milik orang lain, sebab UU Jaminan Fidusia menentukan bahwa barang yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah harus pemilik barang, bukan barang milik orang lain.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Diantha, Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group.

Fuady, Munir. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hanitijo Soemitro, Roni. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mahmud Marzuki, Peter. 2003. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. yogyakarta: Liberty.

Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Otoritas Jasa Keuangan. 2019. Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

salim. 2017. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Saliman, Abdul R. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori Dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.

Suadi, Amran. 2017. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek*. Jakarta: Kencana.

Subekti. 1994. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

**Jurnal**

Hassanah, Hetty. 2016. “Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek DAN Undang\_Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Wawasan Hukum* 32.

Nurmala and Yuswalina. 2019. “Konsep Fidusciaire Eigendoms Overdracht Dalam Kajian Fiqh Muamalah.” *Nurani* 19.

Prasetyawati, Endang. 2012. “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 8(16).

Sari, Devina Puspita. 2019. “Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat Yang Tidak Dapat Dicocokkan Dengan Aslinya Dalam Perkara Perdata.” *Jurnal Hukum* 2.

Wahidah, Zumrotul. 2020. “Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Perdaban Dan Hukum Islam* 03.

Warka, Made and Sudarti. 2014. “Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Dan Upaya Hukum Konsumen.” *Jurnal Ilmu Hukum*.

Yuniarlin, Prihati. 2012. “Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia.” *Jurnal Media Hukum* 19.

**Laman**

Prasetio, Bimo; and Rizky Dwinanto. 2011. “Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial Dalam Hukum Indonesia?” *Hukumonline*. Retrieved (https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/#:~:text=Kerugian Materil%3A,oleh Pemohon di kemudian hari.).

**Peraturan perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2015 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd